

ABSTRAK

Petani di Kabupaten Banjarnegara memberikan kontribusi bagi pembangunan pertanian dan pembangunan ekonomi, sehingga sangat penting diberikan perlindungan dan pemberdayaan melalui pembuatan peraturan daerah yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Masyarakat petani dapat berperan serta dalam pembentukan peraturan daerah dengan memberikan aspirasinya.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah : pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD dalam mengadvokasi aspirasi petani melalui pembentukan perda di Kabupaten Banjarnegara, hasil yang dicapai dalam pelaksanaan advokasi aspirasi petani oleh DPRD serta kendala-kendala yang ditemui oleh anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara dalam mengadvokasi petani melalui pembentukan perda inisiatif untuk perlindungan dan pemberdayaan petani dan solusinya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan menelaah mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD dalam mengadvokasi aspirasi petani melalui pembentukan perda di Kabupaten Banjarnegara, hasil yang dicapai dalam pelaksanaan advokasi aspirasi petani oleh DPRD serta kendala-kendala yang ditemui oleh anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara dalam mengadvokasi petani melalui pembentukan perda inisiatif untuk perlindungan dan pemberdayaan petani dan solusinya.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah : (1) pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD dalam mengadvokasi aspirasi petani melalui pembentukan perda di Kabupaten Banjarnegara dilakukan dengan menampung informasi dan bermusyawarah dengan petani, kegiatan reses, atau melakukan dengar pendapat, dan koordinasi dengan dinas terkait; (2) Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan advokasi aspirasi petani oleh DPRD untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan petani belum optimal karena tidak mudah bagi anggota DPRD dalam mengadvokasi aspirasi petani karena masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Pelaksanaannya juga tergantung pada sosialisasi tentang perda yang telah diundangkan; (3) Kendala-kendala yang ditemui oleh para anggota DPRD dalam mengadvokasi petani, antara lain : (a) para petani yang tidak aktif, (b) kurang paham terhadap ruang penyaluran aspirasi, (c) aspirasi tidak sesuai regulasi, (d) Litbang masih lemah, (e) tergantung keaktifan anggota Dewan, (f) keengganan dari beberapa orang Dinas, (f) belum adanya forum yang aktif, serta (g) petani belum paham manfaat DPRD sebagai wakil rakyat. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut, antara lain dengan : (a) melakukan penyuluhan, (b) mencari referensi, (c) mencari masukan-masukan, (d) konsultasi ke tim ahli dan kunjungan ke daerah lain, (e) memberikan asuransi, (f) jaminan dari pemerintah daerah, (g) sanksi bagi pelaku alih fungsi lahan di luar ketentuan yang berlaku, (h) koordinasi dengan komisi terkait, serta (i) menginventarisir permasalahan.

Kata Kunci : *Kewenangan, DPRD, Aspirasi, dan Peraturan Daerah*

ABSTRACT

The farmers in Banjarnegara Regency contribute to the development of agriculture and economic development, so it is very important to be given protection and empowerment through the making of local regulations made by the Regional House of Representatives. Farming communities can participate in the formulation of local regulations by giving their aspirations.

The problems in this research are : the implementation of duties and authority of Parliament Banjarnegara District (DPRD) in advocating the aspirations of farmers through the formation of local regulations in Banjarnegara Regency, the results achieved in the implementation of advocacy of aspirations of farmers by DPRD and constraints encountered by members of Parliament Banjarnegara District in advocating farmers through the formation of local regulations for the protection and empowerment of farmers and their solutions.

The purpose of this research is to know, analyze and analyze the implementation of duty and authority of DPRD in advocating the aspirations of farmers through the formation of local regulations in Banjarnegara Regency, the results achieved in advocacy aspirations of farmers by DPRD, and constraints encountered by members of DPRD in advocating farmers through the establishment of local regulations for the protection and empowerment of farmers and their solutions. This research uses empirical juridical approach method, with analytical descriptive research specification. The data used in this study are primary and secondary data, obtained through interview and literature study, which then analyzed qualitatively.

The results of this study are : (1) the implementation of the tasks and authority of the DPRD in advocating the aspirations of the farmers through the formation of local regulations in Banjarnegara Regency conducted by accommodating information and deliberating with farmers, recess activities, or conducting hearings, and coordinating with related agencies; (2) The results achieved in the implementation of advocacy of farmers aspirations by DPRD to provide protection and empowerment of farmers is not optimal because it is not easy for DPRD members in advocating the aspirations of farmers because there are still obstacles in the implementation. Its implementation also depends on the socialization of perda which has been enacted; (3) Constraints encountered by DPRD members in advocating farmers, among others : (a) inactive farmers, (b) lack of understanding of aspiration spaces, (c) aspirations not in accordance with regulations, (d) research and development is still weak (f) the reluctance of some agency, (f) the absence of active forums, and (g) the farmers have not understood the benefits of DPRD as the people's representatives. Efforts to overcome these obstacles include : (a) conducting counseling, (b) seeking references, (c) seeking inputs, (d) consulting expert teams and visits to other areas; (e) providing insurance; (f) sanctions for land-use abusers beyond the applicable provisions, (h) coordination with relevant commissions, and (i) to inventory the problems.

Keywords : *Authority, Regional House of Representatives, Aspirations, and Regional Regulations*

